

**PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

(Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

M. INDRA MAULANA

NPM.1351010185

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1439H/2018M

PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Madnasir, S.E., M.S.I.

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1439H/2018M

ABSTRAK

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan dari tahun 2015 bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien,

Tujuan adanya penelitian ini yang *pertama*, untuk mengetahui bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa. *Kedua*, bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimanakah peran dana desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskriptifkan atau melukiskan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa sehingga dapat memberikan peran / kontribusi sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Setelah peneliti mengumpulkan data kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu Analisis data. Analisa yang peneliti lakukan menggunakan dua cara yaitu mengolah data awal dan mengklasifikasikanya dan tahap berikutnya data tersebut akan dianalisa. Pada akhirnya dalam hal ini adalah menarik sebuah kesimpulan dimana penulis menggunakan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus dan dilanjutkan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang kec. Candipuro, kab Lampung selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Kata Kunci: Peran Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Sinar Palembang



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **M. Indra Maulana**

NPM : **1351010185**

Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **“ PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. (STUDI KASUS DI DESA SINAR PALEMBANG, KEC. CANDIPURO, KAB. LAMPUNG SELATAN)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahsahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I ,

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP.197504242002121001

Pembimbing II,

Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir. S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** Oleh: **M. INDRA MAULANA NPM : 1351010185**, Jurusan: **EKONOMI SYARIAH**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Rabu, 07 Februari, 2018.

TIM PENGUJI

Ketua sidang : **Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si.**

(.....)

Sekretaris : **Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.**

(.....)

Penguji I : **Syamsul Hilal, M.Ag.**

(.....)

Penguji II : **Madnasir, S.E., M.Si.**

(.....)

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.(QS.Ar- Ra’d : 11)¹



¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h.368.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan kata syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:


1. Kedua orang tuaku (Bapak Muslihuddin, S.Pd. I dan Ibu Suswati) yang telah ikhlas mengasih dan mendidikku. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Berkat do'a sucimu yang tiada henti untuk anak mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
2. Kakak dan Adik ku (Muhammad Rahman Afifi, Nurma Lailatul Hidayah dan Ferdi Kurniawan) terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan do'a.
3. Untuk seseorang sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat, do'a, dukungannya, dan inspirasinya, selama ini (Veny Asmarani)
4. Sahabat dan keluargaku Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) FU, terimakasih atas persahabatan dan kekeluargaan selama ini.
5. Teman-temanku Gen 2013 EI /B. Tanpa terkecuali, terimakasih atas kebersamaan, persahabatan serta kekeluargaan. Terus berkarya dan berprestasi.
6. Keluarga kecil KKN kelompok 116 (Dimas,Yongki, Nurna, Indah, Nik, Aya', Ili, Ning, Saroh, Oca, Santika dan Triana).
7. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 07 September 1995. Anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Muslihuddin, S.Pd. I dan Ibu Suswati.

Adapun pendidikan yang telah di tempuh yaitu:

1. MI Mathlaul Anwar Sinar Palembang Tahun Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan
2. MTs. MA Cintamulya Tahun Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan
3. MAI MA Cintamulya Tahun Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan



Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan konsentrasi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjadi mahasiswa penulis juga pernah bergabung dalam organisasi UKM Pencak Silat. Selain ikut organisasi di kampus, diluar kampus juga aktif sebagai Pelatih PASKIBRA di Kecamatan Candipuro, sebagai Ketua Rayon Pencak Silat PSHT di Rayon Sinar Palembang serta ikut serta dalam Karang Taruna Desa Sinar Palembang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan). Ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku pembimbing I dan Bapak Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.. selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
6. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.
7. Seluruh staf pemerintahan desa Sinar Palembang yang senantiasa membantu penulis dalam melaksanakan penelitian serta masyarakat yang telah memberikan informasi dan kerjasamanya dalam terlaksanya penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta yang selama ini menjadi teman terbaik dalam bertukar informasi, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman-teman angkatan 2013 khususnya prodi Ekonomi Syariah B yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang

penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 19 Januari 2018

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Peran.....	18
B. Pengertian Desa.....	19
C. Pemerintahan Desa.....	22
D. Dasar-Dasar Pembangunan Desa	25
E. Dana Desa	27
1. Pengertian Dana Desa	27
2. Sumber Dana Desa	27
3. Ketentuan Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.....	28
4. Tujuan Dana Desa	31
F. Pemberdayaan Masyarakat.....	37
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	37
2. Tujuan Pemberdayaan	42
3. Indikator Pemberdayaan Desa.....	43
4. Strategi Pemberdayaan	45
5. Rencana Pembangunan Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat	46
6. Perencanaan Program.....	52
7. Pembangunan Desa Dalam Manajemen Pembangunan Daerah	53
8. Sasaran Pemberdayaan.....	56

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sinar Palembang.....	62
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sinar Palembang	62
2. Kondisi Geografis Desa	63
3. Kependudukan.....	65
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinar Palembang Sebelum Adanya Program Dana Desa	71
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Sinar Palembang Dalam Meningkatkan Pemberdayaam Masyarakat Desa Melalui Program Dana Desa	75
D. Partisipasi Dan Respon Masyarakat Esa Sinar Palembang Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Melalui Dana Desa	86
E. Struktur Perangkat Desa Sinar Palembang Pada Tahun 2017	93

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemberdayaan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Adanya Dana Desa	96
B. Upaya Pemerintah Desa Sinar Palembang Dalam Meningkatkan Pemberdayaam Masyarakat Desa	107
C. Partisipasi Masyarakat Desa Sinar Palembang Dengan Adanya Program Dari Dana Desa	115
D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	118

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dana Desa yang diterima Desa Sinar Palembang Periode 2015-2017	7
Tabel 3.1	Jumlah penduduk pada tahun 2017	65
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	66
Tabel 3.3	Fasilitas Keagamaan.....	66
Tabel.3.4	Tingkat Kesehatan Masyarakat Tahun 2017.....	67
Tabel 3.5	Tingkat Pendidikan Masyarakat	69
Tabel 3.6	Fasilitas Pendidikan	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 . 1	Mekanisme transfer APBN	29
--------------	-------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami Skripsi ini, Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu hasil yang diinginkan.¹

¹ Soekanto, Soerjono. 1990, *Sosiologi Suatu ilmu Pengantar*, jakarta, Rajawali Pres, h. 237

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya.³

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi daya (*empowerment*) atau penguatan (*stengening*).⁴

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis dalam memilih sebagai berikut:

1. Dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat desa Sinar Palembang.
2. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal ini didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan, serta keberadaan tempat penelitian berada pada desa atau pemerintahan

² A saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, jakarta, Bee Media Pustaka, 2015, h.4

³ Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2014, h.117

⁴ *Ibid.*, h.115

desa tempat tinggal penulis. Hal ini bisa mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, selain itu judul yang penulis ajukan telah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

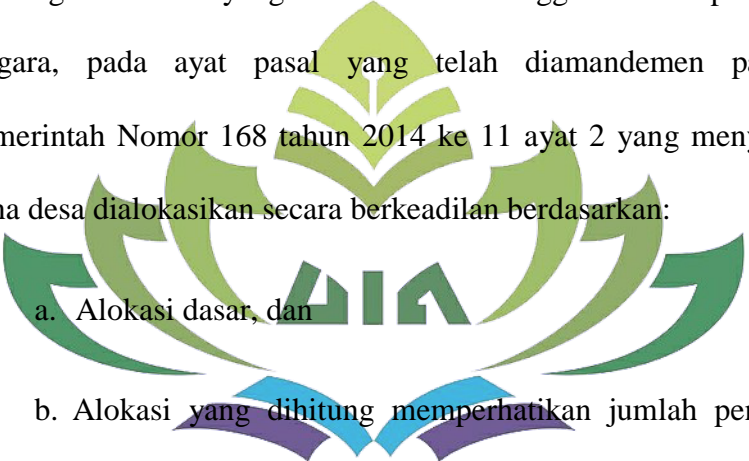
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁵

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini

⁵ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), h.29 - 41

lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- 
- a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁶

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

⁶ *Ibid*, h. 3

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll;

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.⁷

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan

⁷ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015, h. 54

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pelaksanaan program

pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan. Akan tetapi Pada tahun 2014 sebelum pemerintah desa Sinar Palembang menerima aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna.

Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Palembang.

Tabel 1.1
Dana Desa yang diterima Desa Sinar Palembang Periode 2015-2017


No	Tahun	Jumlah
1	2015	Rp. 280.304.200.00
2	2016	Rp. 625.838.967.00
3	2017	Rp. 795.878.977.00
Jumlah		Rp. 1.702.022.140.00

Sumber: APBD Desa Sinar Palembang Tahun 2015-2017

Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa sinar Palembang yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan

pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan pengerasan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong.

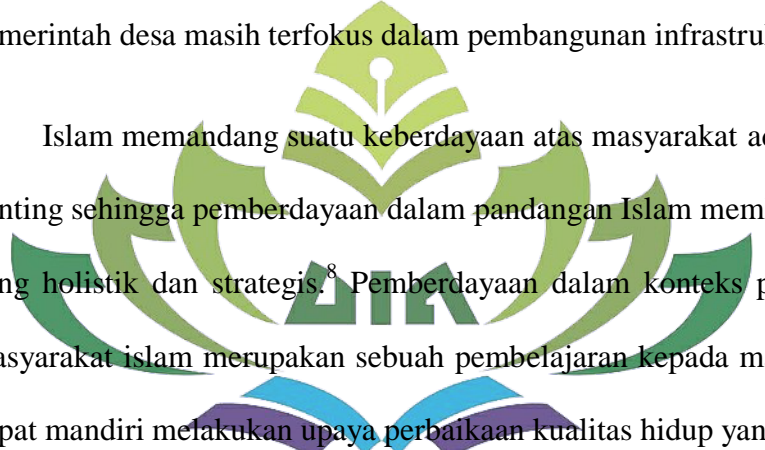
Sedangkan pada tahun 2016 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, seperti pengerasan jalan perlintasan ekonomi masyarakat dan pengadaan perpustakaan desa. Setelah dua tahun berturut pemerintah dapat menjalankan beberapa program secara maksimal dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai pendorong pembangunan dan pemberdayaan.



Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa Sinar Palembang dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terwujud karna pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.



Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis.⁸ Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

⁸ Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3, h.426-432.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya”.*⁹

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa Sinar Palembang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dana desa?
3. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam?

⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h.368.

E. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa Sinar Palembang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dari dana desa.
3. Mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian..
2. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.¹⁰

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya.¹¹ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Sinar Palembang.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta

¹⁰ Suharto, dkk, *Perekayasan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi, 2004, h .99

¹¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.11

menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.¹²

2. Data dan Sumber Data

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakkan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹³ Pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga menadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.¹⁴ Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.206

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (cetakan kelima), (2006), h. 63.

¹⁴ Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.229.

¹⁵ *Ibid*, Suharsini Arikunto, h. 230.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.¹⁶

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancaradalam penelitian ini adalah masyarakat Desa candimas Lampung Utara, dan para aparatur desa yang bertanggung jawab atas penanganan pembangunan desa.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode

¹⁶*Op., Cit*, Joko Subagyo, h.39.

¹⁷*Ibid*, Suharsini Arikunto, h. 202.

dokumentasi untuk memperoleh data tentang pembangunan infrastruktur desa Candimas Lampung Utara dari aparat desa yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti Kepala Desa, dan Kaur Pembangunan.

3. Popoulasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Desa serta Pemerintah Desa ada di dalam Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan Purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dianggap sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

¹⁸ Sugiyono, *Op. Cit*, h.80

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Yang akan di jadikan sampel pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Urusan (KaUr) dan masyarakat.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang di perlukan dari lapangan, maka pengumpulan data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangn, dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat di tarik kesimpulan.¹⁹

Untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif, yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan fakta-

¹⁹ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 89

fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.²⁰

Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan deduktif.²¹



²⁰ Sugiyono, *Ibid*, h.14

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, ANDI, 2004, h. 41

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹

Selain itu, perananpun lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹ Narwoko, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta. KENCANA, 2014) h. 160

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.²

B. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.³

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1. Desa swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini

²Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2012), h..213

³Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h..226.

biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut.

- a. Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b. Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
- c. Adat istiadat masih mengikat kuat.
- d. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e. Prasarana masih sangat kurang.
- f. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
- g. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.⁴

2. Desa swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

⁴*Ibid*, Nurman, h. 231.

- a. Mata pencahian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
- d. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- f. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.⁵

3. Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.

Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

⁵*Ibid*, Nurman, h. 231-232.

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas danprasarana mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.⁶

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

C. Pemerintah desa

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepantinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

⁶*Ibid*, Nurman, h. 232.

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.⁷ Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Bandan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai embaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

⁷*Ibid*, Nurman, h. 233.

- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.⁸

⁸*Ibid*, Nurman, h. 234.

Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.⁹

D. Dasar-dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.¹⁰

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

⁹*Ibid*, Nurman, h. 237.

¹⁰*Ibid*, Nurman, h. 240.

- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.¹¹

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual

¹¹ *Ibid*, Nurman, h. 242.

berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.¹²

E. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹³

2. Sumber dana desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.¹⁴ Belanja negara

¹² *Ibid*, Nurman, hlm. 243.

¹³ A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

¹⁴ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah.¹⁵

Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.¹⁶

3. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas

¹⁵ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

¹⁶ *Ibid*, h. 3

Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:¹⁷

Gambar 2.1
Mekanisme transfer APBN



Sumber : Mekanisme Transfer APBN Berdasar Juknis Pencairan Dana Desa Tahun 2014

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa.¹⁸

- Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.

¹⁷ Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015

¹⁸ *Ibid.* h.19.

- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penyaluran Dana Desa pertama kali diterima desa Sinar Palembang dilakukan secara bertahap pada tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- c. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.²⁰ Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.²¹

4. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

¹⁹ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

²⁰ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

²¹ Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.²²

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.

²² Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015 h. 54

- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.²³

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).²⁴

²³ Deddy supriadi, Dadang sholihin, *otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah*, (jakarta:gramedia pustaka utama,2003), h. 169.

²⁴ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah .*Op.cit.* h. 62

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.²⁵

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa,

²⁵ *Ibid*, h. 16

BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.²⁶

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

²⁶ *Ibid*, h.16.

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:²⁷
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.²⁸

²⁷ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

²⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.²⁹

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).³⁰ Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak

²⁹ Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015), h. 3.

³⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014, h. 48.

pada pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya.³¹

Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).³²

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “energize” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.³³

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya

³¹ Oos M. Anwas, *Op.Cit.*, h. 58

³² Aprilia Theresia, dkk, *Op.Cit.*, h. 146

³³ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004), h. 78.

penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.³⁴

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.³⁵ Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi sluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memilki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kotra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reintrepretasi, reaktualisasi, dan transformasi.

³⁴*Op., Cit*, Nurman, h. 246.

³⁵*Ibid*, Nurman, h 246.

United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. *Getting to know the local community.* Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya. Mengetahi hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.
2. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. Pengetahuan merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
3. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan, faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
4. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau

tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.³⁶

5. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.
6. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat di bimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
7. *Fostering self-confidence.* Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
8. *Deciding on a program action.* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

³⁶*Ibid*, Nurman, h. 247.

9. *Recognition of strengths and resources.* Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal.
10. *Helping people of continue to work on solving their problems.* Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.³⁷
11. *Increasing people ability for self-help.* Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai-nilai dasar dalam upaya pembangunan masyarakat.³⁸

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif,

³⁷*Ibid*, Nurman, h. 248.

³⁸*Ibid*, Nurman, h. 248.

dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.³⁹

Menurut Paul Freire dalam *Keban dan Lele*, pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.⁴⁰

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.⁴¹ Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator

³⁹ *Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiani, h. 80.

⁴⁰ *Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiani, h. 82.

⁴¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 63.

pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD

setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.⁴²

- g. Keterlibatan dalam kampanye dan prote-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.⁴³

4. Strategi Pemberdayaan

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.⁴⁴ Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:

- a. **Aras Mikro**, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. **Aras Mezzo**, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien). Pemberdayaan dilakukan dengan

⁴²*Ibid*, Edi Suharto, h. 64.

⁴³*Ibid*, Edi Suharto, h. 66.

⁴⁴*Ibid*, Edi Suharto, h. 66.

menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. **Aras Makro**, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁴⁵

5. Perencanaan Pembangunan Desa dengan pemberdayaan masyarakat

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

⁴⁵*Ibid*, Edi Suharto, h. 67.

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa.
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.⁴⁶

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.

⁴⁶*Ibid*, Nurman, h. 262.

- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka.⁴⁷

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Strategis**, Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.⁴⁸
- b. **Demokratis dan partisipasi**, perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang

⁴⁷*Ibid*, Nurman, h. 263.

⁴⁸*Ibid*, Nurman, h. 263.

disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntebel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan, mencakup:

- 1) Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengembalian keputusan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa.
- 4) Keterwakilan dari seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan.
- 5) Kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap dokumen perencanaan.
- 6) Pelibatan masih dalam sosialisasi perencanaan.
- 7) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.⁴⁹

⁴⁹*Ibid*, Nurman, h. 264.

c. **Politik**, rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politisi terutama kepala desa dan BPD:

- 1) Dilakukan konsultasi dengan kepala desa untuk penerjemah yang tepat dan sistematis atas visi dan misi dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa.
- 2) Melibatkan BPD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
- 3) Beberapa pokok pemikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
- 4) *Review*, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap rancangan dokumen desa.
- 5) Dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes).
- 6) Pengesahan dokumen rencana pembangunan desa sebagai peraturan desa yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, Nurman, h. 264.

d. **Bottom-up Planning**, perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

- 1) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat kositensi dengan visi, misi, dan program kepala desa terpilih.
- 2) Memperhatikan hasil proses Musenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa.
- 3) Memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.⁵¹

e. **Top-down Planning**, perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- a) Rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah (kabupaten/kota).
- b) Rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.⁵²

⁵¹*Ibid*, Nurman, h. 265.

⁵²*Ibid*, Nurman, h. 265

6. Perencanaan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat tempat, lembaga atau instansi yang terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.⁵³

Hakekat perencanaan atau model perencanaan, dan proses perencanaan program, perencanaan adalah sebuah proses penting dalam menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternative yang terbaik dari sejumlah alternative untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan sosial masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas (menyangkut kemiskinan, pendidikan, kesehatan), perencanaan sosial pada hakikatnya menunjuk pada perencanaan mengenai program

⁵³ *Op. Cit.* Edi Suharto, h. 132.

pelayanan kesejahteraan sosial maka bidang kesejahteraan sosial ini merujuk pada suatu serangkaian kegiatan yang terorganisasi yang ditujukan untuk memungkinkan individu, kelompok dan masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.⁵⁴

7. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat posisi tawar dan percepatan pembangunan di desa yang bersangkutan. Manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah di segala bidang baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1 tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan

⁵⁴*Ibid*, Edi Suharto, h. 133.

Daerah (Repetada) yang terkait langsung dengan APBD, rencana jangka menengah (5 tahun) dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah (Properda), dan rencana jangka panjang (10-25 tahun) dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).⁵⁵

Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa kedepan yang berbeda dalam koordinasinya, sehingga apa pun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah, aspiratif serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJMDes yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah/kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT, RW/ dusun dan desa. Rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran pelaksanaan dalam mekanisme sebagai berikut:

- a. Ditingkat masyarakat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT, RW/ dusun.

⁵⁵ *Ibid*, Nurman, h. 267.

- b. Ditingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang akan dibiayai APBDesa dan atau APBD melalui forum Musbangdes.
- c. Ditingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarahdesa dan akan dibiayai APBD melalui forum Musrenbang.
- d. Diprioritas susulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada di tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut di antaranya, pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya.⁵⁶

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

⁵⁶*Ibid*, Nurman, h. 269.

8. Sasaran Pemberdayaan

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. Di samping itu NGO merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena dipandang lebih bersifat *entrepreneur*, berpengalaman dan inovatif dibandingkan pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.⁵⁷

9. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.⁵⁸

⁵⁷*Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiyani, h. 90.

⁵⁸ Titis Istikomah, “ Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui *Entrepreneurship Capacity Building*, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), h. 45.

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.⁵⁹

Menurut Saefudin nilai-nilai dasar pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Kepemilikan (*ownership*)

Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut.

kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

⁵⁹*Ibid*, Titis Istikomah, h. 49.

b. Keseimbangan

Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Onsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.

c. Keadilan

Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliaan dalam Islam, selain itu kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa, "Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil",⁶⁰

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya di terapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan

⁶⁰ Anwar Abbas "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumen" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad (Vol: IV. No 1 Januari 2012) h. 115-116

perubahan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik.

Dalam Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.⁶¹

Berdasarkan ayat At-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

⁶¹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 368.

Dalam surat al-anfal ayat 53 juga dijelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat/pembangunan melalui pendekatan pribadi-pribadi masyarakat.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٣

*Artinya: “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁶²

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan/pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Sama hanya seperti penjelasan surat an-anfal (08): 53 bawasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

⁶² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Al-Anfaal (58) ayat 53, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 270.

kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelebagaan ajaran Islam kedalam realitas Islam, sebagai berikut:

- a. Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
- b. Penggalangan Ukhuwah Islamiah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
- c. Menjalin dan mewujudkan berbagai MOU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
- d. Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
- e. Katalisasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- f. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- g. Mendampingi penyusunan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan istitusi Islam.
- h. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi , dan lingkungan umat.
- i. Melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk memebangun secara mandiri dan berkelanjutan.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sinar Palembang

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Sinar Palembang

Sejarah terbentuknya Desa Sinar Palembang erat kaitannya dengan pembukaan lahan untuk perkebunan/peladangan oleh masyarakat pendatang dari Palembang Sumatera Selatan pada tahun 1963. Semula bernama Dusun Sinar Palembang yang menginduk ke Desa Sidodadi Kecamatan Katibung kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Selanjutnya tahun 1964, masyarakat dari Jawa Tengah kurang lebih 30 orang berbondong-bondong datang ke Desa Sinar Palembang untuk membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian /peladangan. Atas seizin Mantri Ukur SASTRO (Mantri Ukur Jawatan Transmigrasi 1964). Oleh Mantri ukur di beri izin untuk membuka lahan di sebelah utara areal/dusun Sinar Palembang seluas +- 3 KM. Pembukaan lahan oleh Masyarakat dari Jawa Tengah diberi nama Sido Agung dengan Bayan Bapak Ruslan yang menginduk ke Desa Sidoasri tahun 1965.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian hak kepada masing-masing umbulan (Dusun) Sinar Palembang dan Dusun Sidoagung, maka pada tahun 1967 digabung menjadi satu

Desa, yakni Desa Sinar Palembang dan pada bulan Oktober 1967 diadakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Dari proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, maka terpilih Bapak RUSLAN sebagai Pejabat Kepala Desa Sinar Palembang yang pertama kali. Sejak berdirinya hingga saat ini Desa Sinar Palembang telah dipimpin oleh beberapa beberapa Kepala Desa. Berikut ini adalah rekapitulasi secara berturut-turut:

- a. Kepala Desa Sinar Palembang pertama adalah RUSLAN pada tahun 1967 sampai 1972.
- b. Pada tahun 1972 sampai dengan 1988, Kepala Desa Sinar Palembang di Jabat oleh EFFENDI MIGAM.
- c. Pada tahun 1988 sampai 2006 Kepala Desa Sinar Palembang dijabat oleh SLAMET RIYADI.
- d. Pada tahun 2006 sampai 2017 kepala Desa Sinar Palembang dijabat oleh Pjs. SUPARTIN HALIM.
- e. Pada tahun 2007 sampai 2013 Kepala Desa Sinar Palembang dijabat oleh SUKOCO, S.E
- f. Pada tahun 2013 sampai sekarang, Kepala Desa Sinar Palembang dijabat oleh SUGIAT.

2. Kondisi Geografis Desa

Wilayah Desa Sinar Palembang terletak antara 105.14° sampai dengan 105.45° Buju Timur dan 45.45° sampai dengan 6° Lintang

Selatan.terletak diatas permukaan laut 8-12 M. Desa Sinar Palembang mempunyai luas 496. Ha.Lahan Pekarangan seluas 82 ha, lahan pertanian sawah tadah hujan 221 ha, dan lahan peladangan 193 ha. Adapun batas-batas Wilayah Desa Sinar Palembang adalah :

- a. Sebelah Uatara, berbatasan dengan Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Cinta Mulya Kecamatan Candipuro
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Rantau Minyak Kecamatan Candipuro
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro.

Desa Sinar Palembang terdiri dari Dua Dusun dan 8 RT, yakni Dusun 01 yang berjumlah 4 RT yaitu dari RT 1 sampai RT 4 dan Dusun 02 yang meliputi RT.05 sampai RT.08.

Penduduk Desa Sinar Palembang secara garis besar adalah pendatang dari pulau jawa, di antaranya adalah Jawa Tengah,Jawa Timur (sub suku Jawa), dan di lengkapi dengan beberapa suku lain seperti sunda, Palembang dan lain-lain Orbitasi atau lintas jarak yang dilalui untuk mencapai pusat pemerintahan:

- e. Jarak ke Ibu kota Kecamatan 10 Km.
- f. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 26 Km.
- g. Jarak ke Ibu Kota Propinsi 72 Km.

Desa Sinar Palembang tidak ada sungai, hanya ada DAS Way Katibung di perbatasan Desa Cintamulya, Sementara itu warna tanah sebagian besar hitam dan bertekstur tanah berpasir.

3. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2015 jumlah KK yang ada di Desa Sinar Palembang adalah sejumlah 537 KK dan pada tahun 2016 Jumlah KK di Desa Sinar Palembang mencapai 562 KK, Sedangkan pada tahun 2017 jumlah Kepala Keluarga 576 dengan jumlah Jiwa 2.038, dengan proporsi penduduk laki-laki 1028 jiwa, sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 1.010 orang.

Tabel. 3.1
Jumlah penduduk pada tahun 2017

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.028
2.	Perempuan	1.010
Jumlah		2.038

Sumber : Kantor Desa Sinar Palembang tahun 2017

b. Penduduk Desa Sinar Palembang Berdasarkan Agama

Pada Desa Sinar Palembang terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Agama islam merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh

masyarakat desa sinar Palembang, dimana pemeluk agama Kristen hanya berjumlah 25 KK dari 576 KK yang ada.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Pemeluk (KK)
1.	Islam	551
2.	Kristen	25

Sumber : Kantor Desa Sinar Palembang Tahun 2017

Fasilitas keagamaan yang dimiliki desa sinar Palembang sebagai sarana atau tempat Peribadatan dan juga sebagai tempat pengkajian ilmu-ilmu keagamaan yang dimana hal ini sangat penting keberadaannya dalam pendidikan kerohanian dan akhlak. Desa sinar Palembang memiliki Masjid, Surau/Musholla, Gereja, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Tabel 3.3
Fasilitas Keagamaan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Gereja	1
3.	Surau / Musholah	11
4.	Taman Pendidikan Al-Qur'an /TPA	5
	Jumlah	18

Sumber : Kantor Desa Sinar Palembang Tahun 2017

c. Kesehatan masyarakat Masyarakat Desa Sinar Palembang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan

untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari : indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).¹

Tabel. 3.4
Tingkat Kesehatan Masyarakat Tahun 2017

No	Indikator	Jumlah
1	Angka Kematian Bayi	1
2	Angka Kematian Ibu	0
3	Angka Harapan Hidup (%)	99
4	Persalinan Oleh Tenaga Medis (%)	95

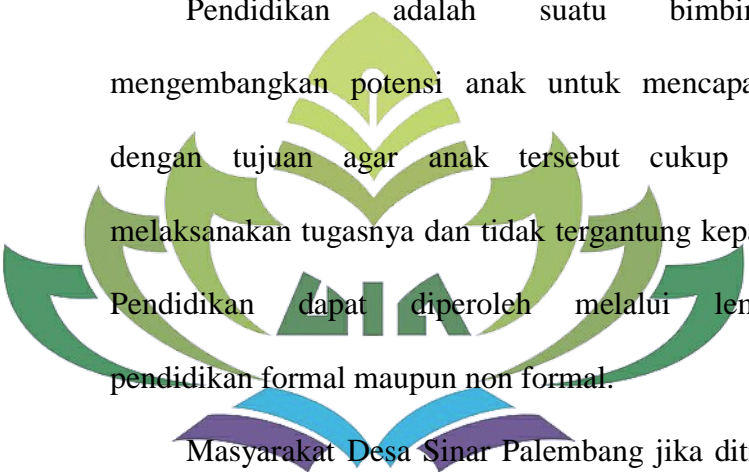
Sumber : Kantor Desa Sinar Palembang Tahun 2017

Tabel diatas menunjukan bahwa meningkatnya taraf kesehatan masyarakat desa sinar palembang. Hal ini ditegaskan oleh seorang tokoh masyarakat yang menjelaskan tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan kurang cukup gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan karena seluruh masyarakat Desa Sinar Palembang dalam penanganan bayi sudah tidak menggunakan tabib atau dukun bayi, ini

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indeks Pembangunan, Kesehatan Manusia, h.11

dikarenakan akses jalan menuju puskesmas semakin mudah serta tersedianya bidan, dan dokter piket sebagai penyelamat angka harapan hidup yang didorong oleh desa. Kemajuan dalam informasi dan mudahnya dalam mengakses internet cukup mudah dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai kesehatan.²

d. Pendidikan Masyarakat Desa Sinar Palembang



Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cekap dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Masyarakat Desa Sinar Palembang jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, lebih dari 50% masyarakat Desa Sinar Palembang telah mencapai wajib belajar 9 tahun.

² Hasil wawancara penulis dengan KAUR KESRA Desa Sinar Palembang 19 September 2017

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah (%)
1.	Penduduk Tidak Tamat SD	20%
2.	Penduduk Tamat SD	25%
3.	Penduduk Tamat SLTP	27%
4.	Penduduk Tamat SLTA	20%
5.	Penduduk Tamat Diploma	3%
6.	Penduduk Tamat S-1	5%

Sumber : Kantor Desa Sinar Palembang Tahun 2017

Pendidikan masyarakat yang kian meningkat dapat diartikan bahwa pola pikir masyarakat mulai terbuka dan memahami begitu pentingnya pendidikan, tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak mampu dalam hal biaya. Bahkan banyak anak yang telah lulus jenjang SLTP lebih memilih berhenti untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Fasilitas Pendidikan / sekolah yang berada di Desa Sinar Palembang sebagai sarana pendidikan dan pengajaran terdiri dari gedung PAUD, TK, SD, MI dan SMP. Pada Desa Sinar Palembang Belum Memiliki Fasilitas Sekolah Pada jenjang Sekolah Menengah Atas / SLTA.

Tabel 3.6
Fasilitas Pendidikan

No	Gedung	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD/MI	2
4	SMP	1

Sumber : Kantor Desa Sinar Palembang Tahun 2017

Fasilitas yang sangat ditunggu oleh masyarakat desa adalah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), dimana masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk menyekolahkan anak-anak nya, Jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke sekolah sekitar 7 sampai 15 km. Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang mayoritas adalah petani dirasa cukup berat karena hasil panen adalah penghasilan pokok dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga/konsumsi dan pembiayaan pendidikan anak-anak.

e. Perekonomian Masyarakat Desa Sinar Palembang

Profesi atau mata pencaharian dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, di mana antara satu daerah dengan daerah yang lainnya selalu berbeda, yang biasanya menyesuaikan dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya.

Mata pencaharian masyarakat Desa Sinar Palembang cukup beragam. Akan tetapi, jenis pekerjaan buruh dan petanilah yang mendominasi atau paling banyak dilakukan oleh penduduk Desa Sinar Palembang. Dengan berdasarkan jumlah ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Sinar Palembang adalah termasuk masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian di sini yakni masyarakat yang mayoritas atau kebanyakan bekerja sebagai petani. Desa sinar palembang memiliki struktur tanah

yang tepat untuk bercocok tanam. komoditi yang mayoritas masyarakat tanam adalah padi dan jagung, sedangkan beberapa lainnya ber profesi sebagai pedagang, PNS, pekerja honor dan buruh tani.

Penghasilan mayoritas petani dalam satu bulan mencapai Rp.2.000.000. pendapatan yang mereka dapatkan tidak menentu sebagai petani yang hanya mengandalkan curah hujan atau lahan tadah hujan dalam bertani, tak jarang petani mengalami kegagalan panen karena kurangnya air yang tersedia untuk tanaman.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinar Palembang Sebelum dan Sesudah Adanya Program Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Sinar Palembang yaitu Bapak Sugiat menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pemberdayaan sebelum adanya dana desa itu ada cuma terbatas, terbatas dalam artian seperti kegiatannya atau pendanaannya masih bersifat swadaya, dari dulu ada cuma terbatas. Makanya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup terdengar atau terlihat di masyarakat, karena itu tadi masih terbatas. Selain itu juga, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal, seperti karangtaruna salah satunya, pemberdayaan pada para pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal.³

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sinar Palembang selama ini belumlah berjalan secara maksimal, terutama sebelum adanya kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah. Tidak hanya itu, proses pembangunan infrastruktur di Desa Sinar Palembang pun kerap kali berbenturan dengan terbatasnya dana yang tersedia.

Dalam wawancara dengan Bapak Kasyono, beliau mengatakan hal yang sama bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintahan desa hanya melakukan pemberdayaan yang minim dengan dana seadanya.

“Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sinar Palembang secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa ini.

³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Sinar Palembang Bapak Sugiat, pada 11 Oktober 2017

Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur untuk pada tahun ini. Makanya keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan belum ada perbaikan. Kasarnya keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa ini cukup jeleklah, seperti jalan di kampung-kampung yang rusak, jembatan juga gitu sama. Selain itu juga, ketika kami pihak pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalau sebelum adanya dana desa”.⁴

Pemberdayaan masyarakat Desa Sinar Palembang sebelum adanya dana desa memang terlihat cukup kurang, atau sekalipun ada belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, keadaan infrastrukturpun masih belum baik, seperti jalan, jembatan dan yang lainnya yang berada di perkampungan.

Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sugiarto, sebelum adanya program Dana Desa (DD) satu milyar perdesa, pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Sinar Palembang hanya memperoleh dana sebesar Rp.64.162.324.00 yang dana tersebut bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa) dan Bantuan Keuangan (BK).

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 Pemerintah semakin memerhatikan perkembangan pedesaan, aliran dana yang cukup besar dialirkan ke setiap desa di Indonesia, dengan harapan desa mampu berkembang dan tidak semakin tertinggal dengan kemajuan-kemajuan yang telah dirasakan di wilayah perkotaan, Begitu juga dengan Desa Sinar

⁴ Hasil Wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Sinar Palembang Bapak Kasyono, pada 04 Oktober 2017

Palembang yang mendapatkan aliran dana tersebut. Secara perlahan pemerintah Desa Sinar Palembang mengupayakan perbaikan disegala lini, mulai dari pembangunan infrastruktur yang tercermin dari adanya pembangunan atau perbaikan jalan di perkampungan. Melalui Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Sinar Palembang mengalokasikan anggaran dana ini untuk sektor pembangunan yang jumlahnya yakni sebesar Rp. 154.965.000.

Dalam wawancara dengan Bapak Sugiarto dikatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraan, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah Pengadaan BUMDES yang berupa Warung Desa. Bumdes menjual kebutuhan pertanian, pengadaan KWT (kelompok wanita tani yang berasal dari program PKK), dalam kegiatan kesehatan yaitu jambanisasi dan pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD), pemberdayaan LINMAS.”⁵

Sebelum adanya dana desa memang hal-hal yang khususnya bersifat pemberdayaan masyarakat dan ataupun pembangunan tidak begitu terasa, hal ini dikarenakan salah satunya adalah terbatas anggaran yang tersedia, bahkan pemberdayaan masyarakat di Desa Sinar Palembang pendanaannya hanya bersifat sealakadarnya atau bersifat swadaya. Melihat keadaan sekarang, dengan adanya dana desa ini mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dalam mengupayakan perbaikan Desa Sinar Palembang. Pembangunan dalam aspek fisik atau infrastruktur,

⁵ Hasil Wawancara Dengan Sekdes Desa Sinar Palembang Bapak Sugiarto, pada 11 Oktober 2017

pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek perlulah ditingkatkan. Dengan dana yang terbilang besar bagi desa sekarang, dalam rangka meningkatkan kualitas desa, dan kualitas masyarakat agar lebih maju dan lebih baik lagi.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Dana Desa

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat. Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa

melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa.

Menurut Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Sinar Palembang yaitu Ibu Listiani menyatakan bahwa tahapan atau proses pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa adalah melalui program-program kerja desa, yang mekanismenya dimulai dengan:

Pertama, pemerintah desa mengadakan musyawarah kedesunan (MUSDUS) di setiap kedesunan dan dihadiri oleh setiap elemen masyarakat di kedesunan, yang tujuannya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat, serta yang harus direalisasikan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran atau satu periode pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, MUSDUS dilakukan sebelum awal tahun anggaran, tepatnya di Desa Sinar Palembang dilaksanakan pada Oktober 2015, yang didalamnya melibatkan ketua RT, serta tokoh-tokoh masyarakat. Di Desa Sinar Palembang sendiri terdapat 2 (dua) kedesunan yang terdiri dari 4 (empat) RT, maka dari itu MUSDUS akan dilaksanakan 2 (dua) kali. Dalam kegiatan MUSDUS tersebut masyarakat mengajukan beberapa aspirasinya, yakni pembangunan jalan dan pengadaan Irigasi bagi para petani di kampung tersebut.

Kedua, setelah semua hasil MUSDUS tertampung, serta semua aspirasi di setiap kedesunan tertampung, maka dilanjutkan dengan MUSDES (Musyawarah Desa), yang dihadiri oleh tokoh agama, pemuda,

ibu-ibu, yang tujuannya adalah untuk menentukan skala prioritas program apa saja yang harus didahulukan di lapangan.⁶

Di Desa Sinar Palembang, MUSDES atau MUSRENBANG dilaksanakan pada Desember 2015, yang dalam pelaksanaannya di hadiri oleh perwakilan dari setiap kedesunan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan MUSDES ini dimaksudkan untuk menindak lanjuti segala aspirasi yang diajukan oleh setiap RT ataupun kedesunan, serta untuk menentukan, menyusun skala prioritas program usulan, yang akan dilaksanakan ataupun didanai menjadi program desa. Prioritas program yang telah ditentukan, selanjutnya akan dituangkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, MUSDES adalah untuk menentukan program-program berdasarkan usulan yang telah diajukan, yang pada selanjutnya disebutkan dengan skala prioritas. Misalkan pembahasan aspirasi yang diajukan oleh Dusun Satu yakni pembangunan jalan serta pengadaan Irigasi. Dalam pelaksanaan MUSDES yang disetujui oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang adalah pembangunan jalan, hal ini dikarenakan pembangunan jalan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten yakni memperbaiki ataupun membangun infrastruktur di perkampungan.⁷ Prioritas program yang telah ditentukan, selanjutnya

⁶ Hasil Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Sinar Palembang Ibu Listiani, pada 12 Oktober 2017

⁷ Hasil Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Sinar Palembang Ibu Listiani, pada 12 Oktober 2017

akan dituangkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Setidaknya dua hal tersebut yang menjadi tahapan sebelum pelaksanaan program dilakukan kepada masyarakat. Ke dua tahapan di atas akan selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam upayanya melaksanakan segala bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan ataupun kegiatan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk strategi pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan yang lainnya.

Secara umum, fungsi dari pemerintahan setidaknya mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Pemerintah desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. Kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut.

Setidaknya hal serupapun dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Sinar Palembang, yang memang diharapkan mampu meningkatkan segala bentuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa upaya yang

memang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital dan penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala nasional. Tidak hanya itu, dengan berjalannya pembangunan infrastruktur, akan sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya, serta dengan pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh pula dalam berbagai sektor.

Kondisi pembangunan di Desa Sinar Palembang saat ini memang belum berjalan secara pesat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa yang dapat dikatakan belum sepenuhnya memadai, salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa. Sesuai dengan salah satu misi dari Desa Sinar Palembang yakni mengoptimalkan sarana dan prasarana desa, maka dalam proses optimalisasi ini diawali dengan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.

Berangkat dari hal ini, maka Pemerintah Desa Sinar Palembang melakukan suatu proses perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari Program Dana Desa (DD). Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam pemanfaatan dana desanya, secara umum memang diprioritaskan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur.

Dana desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat desa, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan desa, dan perbaikan jalan ke tempat pemakaman umum.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2017, Pemerintah Desa Sinar Palembang telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan di dusun-dusun dengan konstruksi cor beton. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Sinar Palembang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 563.796.000, dan dana yang digunakan untuk pembangunan ini bersumber dari Dana Desa (DD).

Melihat pembangunan dari pemerintah desa yang di dorong dengan adanya program dana desa dari tahun 2015 sampai 2017, terdapat tanggapan dari masyarakat Sinar Palembang sendiri. Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri, dikatakan bahwa:

“Sekarang memang pemerintah desa kelihatan pembangunannya, seperti ada pembangunan jalan dan yang lainnya juga. Ini bagus untuk kita semua, biar lebih baik jugakan desanya, lebih maju juga. Yang penting terus berlanjut aja pembangunannya.”⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Rahman dalam wawancara:

“Bagus ya adanya pembangunan jalan dan jembatan, gorong-gorong, biar lebih memudahkan juga untuk masyarakat. Dan sekarang itu,

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri Selaku Masyarakat Desa Sinar Palembang, pada 19 Oktober 2017

cukup baguslah Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam masalah pembangunan, lebih terasa.”⁹

Pembangunan secara bertahap, menyeluruh kepada setiap kampung yang berada di Desa Sinar Palembang, nampaknya mulai dilaksanakan dan cukup membuahkan hasil, pembangunan jalan dan jembatan di beberapa kampunglah yang dapat menjadi tolak ukurnya.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sinar Palembang, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.¹⁰ Hal ini perlu dilakukan, karena kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahman Selaku Masyarakat Desa Sinar Palembang, pada 19 Oktober 2017

¹⁰ Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. (Jakarta, 2016,) h.1

tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk pihak swasta.¹¹

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.¹²

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Sinar Palembang menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Pemerintah Desa Sinar Palembang mengalokasikan dana dari program dana desa sebesar Rp. 15.000.000, pada tahun 2017 untuk mengadakan bangunan dan psarana lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kenyamanan pada kegiatan pelayanan kesehatan bagi bayi, balita, ataupun ibu

¹¹ *Ibid.* Departemen Kesehatan RI. h.1

¹² *Ibid.* Depkes RI. h.2

hamil. Hal ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dalam hal kesehatan masyarakat desa sinar Palembang.

Dalam wawancara dengan Bapak Sugiarto menyatakan bahwa:

“Dalam pemberdayaan bidang kesehatan, kami membangun Posyandu di setiap lingkungan, seperti di Kampung Kaum. Itu salah satu pemberdayaan dalam bidang kesehatan melalui dana desa. Selain itu juga, dalam bidang kesehatan kami memberdayakan para kader-kader Posyandu yang bersinergi dengan bidan desa, alhamdulillah pelaksanaan Posyandu bisa terlaksana di setiap lingkungan dengan jadwal yang sudah diatur. Kemudian kami juga mengalokasikan sarana-sarana penunjang kesehatannya, seperti timbangan bayi, alat cek ibu hamil”¹³.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Desa Sinar Palembang sendiri berharap masyarakat Sinar Palembang terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.

Dalam hal kesehatan pula pemerintahan Desa Sinar Palembang mengalokasikan dana sejumlah Rp.6.000.000,. dalam pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam Program Keluarga Berencana (KB).

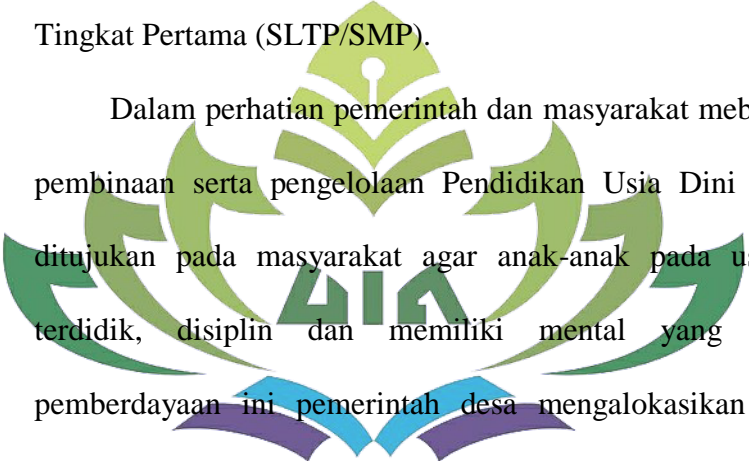
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD dan Perpustakaan Desa

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak

¹³ Hasil Wawancara Dengan Sekdes Desa Sinar Palembang Bapak Sugiarto, pada 11 Oktober 2017

tersebut cukup cekap dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Masyarakat Desa Sinar Palembang jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan banyak juga yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih dari 60% masyarakat Desa Sinar Palembang telah mencapai minimal 9 tahun belajar atau telah mencapai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP).



Dalam perhatian pemerintah dan masyarakat membentuk program pembinaan serta pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang ditujukan pada masyarakat agar anak-anak pada usia dini dapat terdidik, disiplin dan memiliki mental yang baik. Dalam pemberdayaan ini pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp.13.000.000., kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anak sejak dini Di Desa Sinar Palembang cukup baik dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang menyekolahkan anak-anak di PAUD Desa Sinar Palembang.

4. Pengembangan Keolahragaan

Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana desa sejumlah Rp.18.600.000., dalam pengembangan keolahragaan masyarakat Desa Sinar Palembang Pemerintah Desa Mengajak Masyarakat khususnya pemuda untuk aktif dalam keolahragaan, hal

ini dimaksudkan agar masyarakat desa bisa berkumpul dan dapat menjalin komunikasi dengan baik antar sesama masyarakat, selain itu perhatian pemerintah pada kesehatan masyarakat.

5. Kegiatan Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Sinar Palembang merupakan Pemeluk agama Islam dan sebagiannya lagi adalah memeluk agama Kristen. Pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa juga di alokasikan untuk kegiatan kegiatan keagamaan seperti dalam Peringatan Hari Besar Islam. Dalam kegiatan keagamaan ini pemerintah alokasikan dana Rp. 25.000.000,. dengan adanya aliran dana desa untuk kegiatan keagamaan Desa sinar Palembang masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan, contohnya dalam mengikuti peringatan Maulid Nabi yang semakin meriah.

Dalam wawancara dengan Bapak Tendi Riyanto selaku Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Sinar Palembang, Beliau Menyampaikan :

“alhamdulillah dengan adanya program pemerintah desa yang dibantu dengan adanya dana desa kegiatan keagamaan Desa Sinar Palembang dapat berjalan lebih Maksimal, pada tahun 2017 ini pemerintah desa mengalokasikan untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp. 25.000.000.,

ini sangat membantu untuk kami memenuhi kebutuhan dalam kegiatan keagamaan. Untuk sewa tenda dan sound alhamdulillah terbantu”.¹⁴

6. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Wanita Tani (KWT)

Tidak hanya itu, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Desa Sinar Palembang mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KWT ini salah satunya adalah pemanfaatan lahan taman yaitu membuat taman yang menghasilkan dengan menanam kebutuhan dapur seperti cabai, tomat, terong dll. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah desa sinar Palembang mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa sebesar Rp. 20.000.000,.

D. Partisipasi dan Respon Masyarakat Desa Sinar Palembang dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Melalui Dana Desa

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tendi Riyanto Pengurus Masjid Desa Sinar Palembang, pada 15 Oktober 2017

Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Saat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan stagnan atau statis, jalan di tempat belum, adanya perkembangan.

Mungkin alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Desa Sinar Palembang untuk berbenah diri.

Dewasa ini, proses atau program pemberdayaan di Desa Sinar Palembang mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya, Pemerintah Desa Sinar Palembang sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Sinar Palembang itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Sinar

Palembang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ataupun pembangunan sangatlah penting, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan, yakni *pertama* partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. *Ketiga*, akan timbulnya anggapan pemenuhan hak demokrasi ketika mereka ikut terlibat dalam pembangunan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya, serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Sinar Palembang dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat, sembari di dalamnya mensosialisasikan pendapatan dana desa tersebut. Dalam wawancara bapak Yahya selaku masyarakat desa menyampaikan bahwa:

“Masyarakat Desa Sinar Palembang saya rasa tidak begitu acuh terutama dalam kegiatan pembangunan ataupun yang lainnya juga. Mereka pasti menyempatkan waktu untuk sebisa mungkin ikut aktif dalam kegiatan. Nah untuk masalah program pemberdayaan masyarakat dengan dana desa ini, masyarakatpun setidaknya ikut aktif atau berpartisipasi. Misal ketika pemerintah desa meminta untuk merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka hadir menyumbangkan ide-idenya, dan apa yang diinginkan oleh mereka. Terus, ketika dalam pelaksanaan program pembangunanpun masyarakat hadir, mereka ikut kerjasama dalam melaksanakan program itu. Menurut saya, ini adalah bentuk partisipasi

masyarakat dalam program pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.”¹⁵

Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan di wilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dalam wawancara dengan Bapak Homsidin, dikatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan mereka pun, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”¹⁶

Partisipasi masyarakat pada dasarnya sangatlah diperlukan sejak awal dalam proses perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat ikut terlibat secara menyeluruh dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan, juga dengan adanya partisipasi masyarakat menjadi sebuah garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yahya Masyarakat Desa Sinar Palembang, pada 15 Oktober 2017

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Homsidin Kadus 01 Desa Sinar Palembang, pada 15 Oktober 2017

Pemerintah Desa Sinar Palembang terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pemberdayaan. Selain itu, dalam pemberdayaan di Desa Sinar Palembang hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja, pemberdayaan masyarakat melalui suatu wadah yang memungkinkan individu yang di dalamnya mampu mengembangkan potensi dirinya, dirasa masyarakat belum begitu menonjol. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak Muslihudin mengungkapkan bahwa jikalau melihat pada perihal pembangunan khususnya infrastruktur umum, seperti pengelolaan Pendidikan Usia Dini dan Pos Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang cukup baik dan memang terasa manfaatnya, akan tetapi tidak hanya pembangunan infrastruktur seperti ini saja. Pemberdayaan masyarakat seperti adanya koperasi, penguatan LPM dan karang taruna, perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali.

Pemberdayaan masyarakat memang seharusnya tidak hanya semata-mata dengan membangun sarana atau infrastruktur saja, melainkan pemerintah desa harus membuat suatu wadah yang mampu menjadi instrumen bagi masyarakat untuk berkembang atau mengembangkan dirinya. Misalkan pemerintah memperkuat kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, dan koperasi, karena dalam pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan dan melibatkan segenap potensi dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Penguatan lembaga lembaga pemberdayaan yang bersinergi dengan pemerintah desa sudah sepatutnya dilaksanakan, setidaknya ini akan membantu terhadap program-program pemerintah Desa Sinar Palembang, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan perekonomian.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah adanya prinsip partisipatif yang harus tetap dijaga oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD). Artinya, masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam proses perencanaan, dan pelaksanaan, dan hal-hal lainnya.

Bapak Muslihudin juga berpendapat bahwa pemerintah desa Sinar Palembang pada pengelolaan dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.

Tujuan dari adanya prinsip partisipatif ini adalah hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan-kebutuhannya, ataupun tuntutan kepada pihak pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Dana Desa (DD). Juga keterlibatan masyarakat sedikit banyaknya akan mempengaruhi kebijakan dalam pemanfaatan Dana Desa. Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat ini akan mampu mengawasi terhadap pelaksanaan program sebagai suatu bentuk realisasi Dana Desa (DD), utamanya untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari wawancara dengan bapak Zainudin selaku masyarakat desa Sinar Palembang mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap RT/Dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah proses pertanggungjawaban. Seperti dalam wawancara yang kepada Bapak Ahmad Zainuri:

“Pemerintah Desa Sinar Palembang harus transparan kepada masyarakat, minimal pada pihak RT dan RW, atau bisa juga ditempel pada pos kamling, jadi masyarakat akan tahu arah dan penggunaan dana desa”.¹⁷

Pertanggungjawaban, transparansi merupakan suatu kewajiban dan suatu bentuk keharusan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang sebagai administrasi pemberdayaan dan yang lainnya,

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri Selaku Masyarakat Desa Sinar Palembang, pada 19 Oktober 2017

sekalius pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima atau sebagai kelompok sasaran program. Tujuan dari adanya pertanggungjawaban dan ataupun transparansi ini adalah suatu langkah untuk menjaga dari ketidakjelasan akan penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat.

Ketika proses-proses ini dilaksanakan sebagai mana mestinya, maka diharapkan akan mampu memenuhi tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pihak Pemerintah Desa Sinar Palembang itu sendiri.

E. Struktur perangkat desa Sinar Palembang pada tahun 2017

Kepala Desa : SUGIAT

Sekertaris : SUGIARTO

1. Kepala Seksi

- Pemerinta : NURSODIK
- Pembangunan : KASYONO
- Kesra : LISTIANI (PLH)

2. Kepala Urusan

- Kaur Umum : S. SUPONO
- Kaur Administ : EKO PRASETIO
- Kaur Keuangan : NUNING S.

3. Kepala Wilayah

- Kadus Satu (1) : HOMSIDIN
- 1. Rt 1/A : NGARIPIN
- 2. Rt 1/B : WAHID

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 3. Rt 2/A | : SURYONO |
| 4. Rt 2/B | : NURKHOLIK |
| 5. Rt 3/A | : MISLAM |
| 6. Rt 3/B | : SAMIN |
| 7. Rt 4 | : TUMIRAN |
| - Kadus Dua (2) : MARTONO | |
| 1. Rt 5 | : SISWONDO |
| 2. Rt 6 | : NASRUDIN |
| 3. Rt 7 | : SUKMA MA'SUM |
| 4. Rt 8/A | : DADANG SUPRAYITNO |
| 5. Rt 8/B | : EDI SUSANTO |

Struktur Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Ketua	: SOHIBUN
Wakil Ketua	: MUSLIHUDIN, S.PDI
Sekretaris	: NAJAMUDIN
Bendahara	:
Anggota	:
-	SULASTIONO
-	HERDIANSYAH
-	WARTIO
-	ARIS MUNANDAR
-	NURHASIM
-	RIDWAN

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Ketua | : TENDI RIYANTO, S.Pd I |
| 2. Sekretaris | : DEDE SITI ZUBAIDAH, S. Pd I |
| 3. Bendahara | : SUKMA MA'SUM |

Bidang- Bidang :

- | | |
|------------------------|---------------|
| a. Agama Dan Kerukunan | : MUSLIKHUDIN |
| b. Hukum Dan Perundang | : MUSLIHUN |

- c. Sdm Dan Tek, Tepat Guna : DRS. MANILAL. RI. MSI
- d. Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga : YULIATI
- e. Pemberdaan Ekonomi Kerakyatan : SUKIMAN
- f. Pemuda, Olah Raga, Dan Seni Budaya : AGUS SALIM
- g. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup: AGUS SP
- h. Informasi Komunikasi Dan Media Masa : GUNAWAN



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pemberdayaan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Adanya Dana Desa

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014, h 48

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).²

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.

² Chabib Sholeh, Heru Rochansjah .*Op.cit.* h. 62

2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.³

Prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan

³ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015 h. 54

- c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:⁴
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.⁵

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Sinar Palembang yaitu Bapak Sugiat menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pemberdayaan sebelum adanya dana desa itu ada, namun terbatas dalam artian seperti kegiatannya atau pendanaannya

⁴ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

⁵ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

masih bersifat swadaya. Maka pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup berjalan atau terlihat di masyarakat. Selain itu juga, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal, seperti karangtaruna salah satunya, pemberdayaan pada para pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal.⁶

Dalam wawancara dengan Bapak Kasyono selaku Kasi Pembangunan Desa Sinar Palembang, beliau mengatakan hal yang sama, dimana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintahan desa hanya melakukan pemberdayaan yang minim dengan dana seadanya.

“Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sinar Palembang secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa ini. Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur untuk pada tahun ini. Maka keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan belum ada perbaikan. Keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa kondisinya kurang layak, seperti jalan di kampung-kampung yang rusak, jembatan juga sama. Selain itu juga, ketika kami pihak pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalau sebelum adanya dana desa.”⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa sangat terbatas dalam segi pendanaan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sinar Palembang Bapak Sugiat, pada 11 Oktober 2017.

⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Sinar Palembang Bapak Kasyono, pada 04 Oktober 2017

infrastruktur Desa sinar Palembang dikala itu bersifat swadaya gotong royong masyarakat dengan sukarela.

Peran dana desa dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Sinar Palembang, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga lembaga yang ada di Desa Sinar Palembang. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan dengan lancar, dalam artian pembangunan terus berjalan dalam membenahi infrastruktur desa seperti jalan yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki. Beberapa jalan desa yang tadinya onderlagh sekarang meningkat menjadi jalan cor beton.

Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.⁸ Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa setelah adanya dana desa sebagai pendorong terlaksananya program yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur yang bertujuan menacapai kemandirian desa, yaitu desa yang tidak hanya sebagai objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pengelolaan dana desa.

⁸Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: GavaMedia,2004), h. 78

Dengan adanya dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh, dalam artian pemerintah memandang jauh kepada desa sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara. Dengan digulirkannya dana desa sebagai stimulan pembangunan dan pemberdayaan yang akan menjadikan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa bukanlah hanya menjadi objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pemberi manfaat kepada warga masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

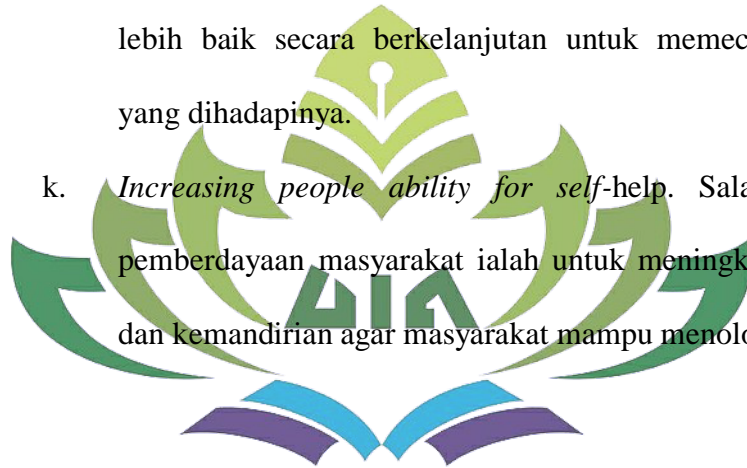
Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dari luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi. United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. *Getting to know the local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk

perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya.

- b. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat.
- c. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.
- e. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat dibimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
- g. *Fostering self-confidance.* Membangun rasa perca diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

- h. *Deciding on a program action.* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan.
- i. *Recognition of strengths and resources.* Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal.
- j. *Helping people of continue to work on solving their problems.* Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
- k. *Increasing people ability for self-help.* Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri.



Dalam wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Sekretaris Desa Sinar Palembang dikatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah dalam kegiatan kesehatan yaitu jambanisasi dan pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD) pemberdayaan LINMAS.”⁹

⁹ Hasil wawancara Dengan Sekdes Desa Sinar Palembang Bapak Sugiarto, pada 11 Oktober 2017

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sinar Palembang dapat disimpulkan bahwa setelah adanya dana desa pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Contoh dari pemberdayaan dari segi ekonomi dapat dilihat dengan diadakannya Bumdes berupa warung desa yang menjual bermacam kebutuhan petani seperti alat pertanian, pupuk dan obat-obatan tanaman, sebagai salah satu solusi dalam membantu masyarakat desa yang mayoritas adalah petani meskipun dalam kenyataannya belum dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat.

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.¹⁰ Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:

- a. *Aras Mikro*, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- b. *Aras Mezzo*, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi, Pendidikan

¹⁰*Ibid*, Edi Suharto, h. 66.

dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. *Aras Makro*, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan bapak Sugiarto selaku Sekretaris Desa Sinar Palembang pemberdayaan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sinar Palembang dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan tiga aras diatas. Yaitu *Aras Mikro*, dimana pemerintah desa dalam memberdayakan LINMAS sebagai alat keamanan desa. dlam hal ini pemerintah mengadakan pelatihan Linmas dan bimbingan utuk menjadikan anggota linmas menjadi sosok yang bertanggungjawab. Pelatihan diberikan kepada masyarakat yang bersedia menjadi anggota keamanan desa. Pemerintah desa juga mengalokasikan Dana Desa untuk insentif anggota linmas. *Aras Mezzo*, pemerintah Desa Sinar Palembang menggunakan kelompok sebagai media intervensi, Pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok. Hal ini terwujud

dalam pemberdayaan PKK yang pada kelompok ini diberikan penyuluhan dan pelatihan berbagai macam cara bertani dan menanam sayuran. *Aras Makro*, pada pendekatan aras makro ini terwujud dengan terlaksananya Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Dapat dilihat bahwa pemerintah dan masyarakat selalu bekerjasama, bermusyawarah dan menyepakati usulan masyarakat membentuk program dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa .

B. Upaya Pemerintah Desa Sinar Palembang Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.¹¹

Dengan menggelontorkan Dana Desa untuk seluruh desa yang berada di Indonesia, berarti pemerintah berupaya agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk desa membangun dirinya agar dapat berkembang pesat. Desa yang otonom diberi ruang gerak

¹¹*Op., Cit*, Nurman, h. 246.

yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.¹²

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Sinar Palembang perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa.

¹²*Ibid*, Nurman, h 246.

3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.¹³

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam pembangunan masyarakat berperan dalam program swakelola pembangunan desa.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.¹⁴

Pada pemberdayaan yang berlangsung di Desa Sinar Palembang. tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk

¹³ *Ibid*, Nurman, h. 262.

¹⁴ *Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiani, h. 80.

bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka.

Undang-undan RI Nomor 25 Tahun 2004 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Strategis, Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang

berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsip Strategi, dapat dijalankan oleh pemerintah Desa Sinar Palembang dengan melaksanakan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang bertujuan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang kebutuhan dan program yang akan di ajukan dalam musdes agar dapat terwujud. Pada Musyawarah Dusun yang dipimpin oleh ketua dusun dengan diikuti oleh RT dan perwakilan dari setiap RT. Setelah musdus telah dilaksanakan hasil dari musdus setiap dusun akan dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musrenbang.

- b. Demokratis dan partisipasi, perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan.

Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan, mencakup:

- 1) Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

- 2) Kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa.
- 4) Keterwakilan dari seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan.
- 5) Kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap dokumen perencanaan.
- 6) Pelibatan masih dalam sosialisasi perencanaan.
- 7) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.¹⁵

Dalam hal ini pemerintah Desa Sinar Palembang melibatkan seluruh aspek yang ada, mulai dari perangkat desa sendiri, masyarakat dan lembaga lembaga dan organisasi yang ada di Desa Sinar Palembang dalam awal perencanaan, pengelolaan dan sampai akhir yaitu pertanggungjawaban.

- c. Politik, rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan

¹⁵ *Ibid*, Nurman, h. 264.

proses konsultasi dengan kekuatan politisi terutama kepala desa dan BPD:

- 1) Dilakukan konsultasi dengan kepala desa untuk penerjemah yang tepat dan sistematis atas visi dan misi dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa.
- 2) Melibatkan BPD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
- 3) Beberapa pokok pemikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
- 4) *Review*, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap rancangan dokumen desa.
- 5) Dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes).
- 6) Pengesahan dokumen rencana pembangunan desa sebagai peraturan desa yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.¹⁶

Berjalanya Perencanaan, pengelolaan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selalu berdampingan dengan BPD. Hal ini diharapkan akan mendukung berjalanya program serta terdapat pengawasan dan komunikasi antara pemerintahan desa dan BPD.

¹⁶ *Ibid*, Nurman, h. 264.

d. Bottom-up Planning, perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

- 1) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat kositensi dengan visi, misi, dan program kepala desa terpilih.
- 2) Memperhatikan hasil proses Musenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa.
- 3) Memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.¹⁷

Prinsip Bottom-up Planning ini terealisasi dengan usulan yang disampaikan masyarakat dalam musdes maupun musdes untuk kepentingan bersama. MUSDES adalah untuk menentukan program-program berdasarkan usulan yang telah diajukan, yang pada selanjutnya disebutkan dengan skala prioritas. Misalkan pembahasan aspirasi yang diajukan oleh Dusun Satu yakni pembangunan jalan serta pengadaan Irigasi. Dalam pelaksanaan MUSDES yang disetujui oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang adalah pembangunan jalan. hal ini dikarenakan pembangunan jalan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah desa yakni memperbaiki ataupun membangun infrastruktur di perkampungan.¹⁸

e. Top-down Planning, perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi

¹⁷ *Ibid*, Nurman, h. 265.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Sinar Palembang Ibu Listiani, pada 12 Oktober 2017

dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- 1) Rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah (kabupaten/kota).
- 2) Rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.¹⁹

Pada umumnya perencanaan pembangunan desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, pembangunan yang ditekankan oleh pemerintah kabupaten pada setiap desa adalah pembangunan fisik desa, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana desa seperti perbaikan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

C. Partisipasi Masyarakat Desa Sinar Palembang Dengan Adanya Program Dari Dana Desa

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut akibat terbatasnya anggaran yang terdapat disetiap

¹⁹*Ibid*, Nurman, h. 265

pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Dewasa ini, proses atau program pemberdayaan di Desa Sinar Palembang mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya, Pemerintah Desa Sinar Palembang sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Sinar Palembang itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Sinar Palembang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya, serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Sinar Palembang dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat.

Dalamnya mensosialisasikan pendapatan dana desa tersebut. Dalam wawancara bapak Yahya selaku masyarakat desa menyampaikan bahwa:

“Masyarakat Desa Sinar Palembang saya rasa tidak begitu acuh terutama dalam kegiatan pembangunan ataupun yang lainnya juga. Mereka pasti menyempatkan waktu untuk sebisa mungkin ikut aktif dalam kegiatan. Untuk masalah program pemberdayaan masyarakat dengan dana desa ini, masyarakatpun setidaknya ikut aktif atau berpartisipasi. Misal ketika pemerintah desa meminta untuk merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka hadir menyumbangkan ide-idenya, dan apa yang diinginkan oleh mereka. Terus, ketika dalam pelaksanaan program pembangunanpun masyarakat hadir, mereka ikut kerjasama dalam melaksanakan program itu. Menurut saya, ini adalah bentuk partisipasi

masyarakat dalam program pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.”²⁰

Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dalam wawancara dengan Bapak Homsidin, dikatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan mereka pun, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”²¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Sinar Palembang sangat baik dalam membangun desa bekerja sama dengan pemerintahan desa menjalankan program yang telah disepakati secara bersama. Dari muai perencanaan, pengelolaan bahkan sampai pada pembuatan pertanggungjawaban dimana masyarakat ikut memantau jalannya pengelolaan dana desa.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yahya Masyarakat Desa Sinar Palembang, pada 15 Oktober 2017

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Homsidin Kadus 01 Desa Sinar Palembang, pada 15 Oktober 2017

D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.²²

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Sinar Palembang untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah desa Sinar Palembang sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak Sugiarto dikatakan bahwa:

²²*Ibid*, Titis Istikomah, h. 49.

“Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah dalam kegiatan kesehatan yaitu jambanisasi dan pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD), pemberdayaan LINMAS.”²³

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa Sinar Palembang berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta bkreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan Sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

*Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*²⁴

²³ Hasil Wawancara Dengan Sekdes Desa Sinar Palembang Bapak Sugiarto, pada 11 Oktober 2017

²⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Al-Qashash (28) ayat 77, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 623.

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinyadalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Jika melihat dari teori yang dikemukakan oleh Saefudin menjelaskan adanya nilai-nilai dasar sistem ekonomi. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada pemberdayaan masyarakat seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pemberdayaan yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.

a. **Kepemilikan**

Pemerintah desa dapat memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

b. **Keseimbangan**

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kewajiban yang harus terealisasikan.

Dalam wawancara dengan bapak Muslihudin sebagai seorang tokoh agama berpendapat bahwa pemerintah desa Sinar Palembang pada pengelolaan dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara berdasar pada teori diatas menunjukkan bahwa konsep kesimbangan pada pengelolaan dana desa di desa Sinar Palembang telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa Sinar Palembang.

c. Keadilan

Pada konsep keadilan ini dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwasanya Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil dimana disebutkan dalam Al-Qur'an paling banyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan baik keadilan dalam aspek sosial, politik maupun ekonomi.

Berdasarkan teori diatas pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan keadilan yang merata bagi masyarakat selaku objek dari pemberdayaan.

Dari wawancara dengan bapak Zainudin selaku masyarakat desa Sinar Palembang mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap RT/Dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Berdasarkan teori dan wawancara yang ada terkait keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Sinar Palembang sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaanya belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari keadaan beberapa jalan penghubung antar desa di beberapa wilayah yang masih rusak, begitu juga jembatan, serta belum ada pembangunan-pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sinar Palembang.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sinar Palembang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa

perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, Posyandu, dan gorong-gorong adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Sinar Palembang untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Sesuai dengan kandungan isi dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sinar Palembang telah mencerminkan nilai-nilai dasar dari ekonomi islam :

- a. Kepemilikan, Pemerintah desa dapat memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

- b. Keseimbangan, pada pengelolaan dana desa di desa Sinar Palembang telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan sebagaimana mestinya. Dimana pemerintah desa menjalankan kewajiban dalam merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, serta masyarakat menerima apa yang menjadi hak dalam pembangunan dan pemberdayaan.
- c. Keadilan, keadilan yang terwujud pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan bersama pada musdes yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan.

B. Saran

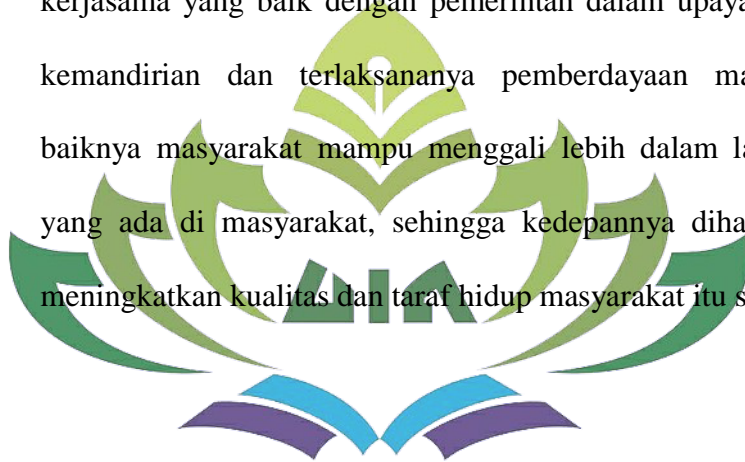
Setelah melaksanakan penelitian di Desa Sinar Palembang, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni:

1. Saran Kepada Pemerintah
 - a. Pemberdayaan masyarakat alangkah lebih baiknya tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada di masyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan, agar masyarakat mampu berkembang. Contohnya pembuatan kelompok-kelompok Ekonomi kreatif, pengadaan mekanisme pasar desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang mandiri.
 - b. Transparansi dana kepada masyarakat dirasa perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas

jumlah serta program yang dilakukan, selain itu juga dengan adanya transparansi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah Desa sendiri, juga meningkatkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

2. Saran Kepada Masyarakat

Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat serta baiknya masyarakat mampu menggali lebih dalam lagi potensi apa yang ada di masyarakat, sehingga kedepannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Abbas “*Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumen*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad (Vol: IV. No 1 Januari 2012).
- A Saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Bee Media Pustaka, 2015).
- Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004).
- Aprilia Theresia, Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung, Alfabeta, 2014).
- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014).
- Buku Profil Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017.
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung:FOKUS MEDIA , 2015).
- Deddy Supriadi, Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2003).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (Cetakan Kelima), (2006).
- Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015
- Narwoko, Dan Bagong Suyanto. *SOSIOLOGI TEKS PENGANTAR DAN TERAPAN*, (Jakarta. KENCANA, 2014)

Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung, Alfabeta, 2014).

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Pres. 1990).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Susiadi, *Metode Penelitian Dana Penerbitan LP2M (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)*.



WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara Pemerintahan Desa Sinar Palembang

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Jabatan :

Waktu/Tempat :

1. Adakah pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa ?
2. Bagaimanakah sifat pemberdayaan sebelum adanya dana desa ?
3. Seperti apakah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan sebelum adanya dana desa ?
4. Adakah kendala dalam pemberdayaan sebelum adanya dana desa ?
5. Bagaimanakah pemberdayaan setelah adanya dana desa ?
6. Bagaimana sifat pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa ?
7. Seperti apakah partisipasi masyarakat setelah adanya dana desa ?
8. Dengan adanya dana desa, bidang apa yang diutamakan di Desa Sinar Palembang ?
9. Setelah adanya dana desa, upaya apa saja yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat ?
10. Berjalankah pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa ?
11. Dengan adanya dana desa apasajakah yang telah terealisasi dalam pemberdayaan dan pembangunan ?
12. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah desa sinar Palembang dalam pengelolaan dana desa ?

DAFTAR GAMBAR



Pembangunan gorong-gorong



Penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa dengan pengawasan dari kepolisian



Pembangunan jalan rabat beton



Pemberdayaan dalam bidang keagamaan



Pemberdayaan dalam bidang



Pengarahan dari kepala desa kepada PKK



Pengadaan bangunan aula posyandu



Swakelola /swasembada dalam pembuatan rabat cor brton



Pengadaan bangunan pendidikan usia dini (PAUD)



Papan nama desa Sinar Palembang



Kantor desa Sinar Palembang



Pengadaan Pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS)



Realisasi pembangunan rabat beton





Wawancara dengan Bapak Homsidin (Kepala Dusun / KADUS 1)



Wawancara dengan Bapak Sugiat (Kepala Desa Sinar Palembang)



Wawancara dengan Bapak Kasyono (Kepala Urusan Bidang Pembangunan)